



# PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH *LKIP 2023*

# KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan LKIP Tahun 2023, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023 dapat diselesaikan.

LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2023 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, namun disadari masih jauh dari sasaran pembangunan yang diharapkan. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami sadari sungguh bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karenanya berbagai saran dan masukan demi penyempurnaan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ini kedepan sangat kami harapkan. Akhirnya semoga Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

TerimaKasih.

Piru, 27 Maret 2024

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



**ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN, SE, MH**



**P**enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya selama setahun dalam memberikan pelayanan publik baik yang berkenaan langsung maupun tidak, termasuk didalamnya kegagalan pencapaian keberhasilan. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan LKIP dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, di mana pelaporan

capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemda dalam hal ini kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja tahun 2023 telah berhasil dicapai. Sebagai pembanding, kualitas pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten secara umum dapat dilihat dari gambaran perkembangan kondisi makro Kabupaten Seram Bagian Barat. Indikator makro Kabupaten Seram Bagian Barat mencerminkan angka-angka atau nilai-nilai perkembangan atau perubahan kondisi sosial, ekonomi dan pembangunan manusia. Secara umum Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas tujuan dan sasaran utama dengan rata-rata capaian kinerja 98,92 % atau berkategori "Sangat Memuaskan". Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian barat tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dengan capaian 107,49 % kategori predikat Sangat Memuaskan.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian 85,85 % kategori predikat Memuaskan.
3. Menurunnya Kemiskinan dengan capaian 105 % kategori predikat Sangat Memuaskan.
4. Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah Yang Berkelanjutan dengan capaian 92,49 % kategori predikat Sangat Memuaskan.

5. Meningkatnya Keberadaan Sosial Masyarakat dengan 68,48 % kategori predikat Baik.
6. Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Bencana dengan capaian 4,98 % kategori predikat Sangat Kurang, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yang tidak mencapai target.
7. Sasaran Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat dengan capaian 13 % kategori predikat Sangat Kurang, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.
8. Sasaran Teraktualisasinya nilai-nilai budaya Pela Gandong dan Masohi sebagai modal sosial pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan capaian 122,5 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.
9. Sasaran Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan Pelayanan Pendidikan dengan capaian 79,28 % kategori predikat Sangat Baik, dengan 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja.
10. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat dengan capaian 80,45 % kategori predikat Memuaskan, dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja.
11. Sasaran Meningkatnya kinerja koperasi, industri kecil dan usaha mikro dengan capaian 162,6 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 5 (lima) Indikator Kinerja.
12. Sasaran Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan dengan capaian 123,8 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja.
13. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan capaian 91,42 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.

14. Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas infastruktur dengan capaian 128,20 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja.
15. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan hidup dengan capaian 53,03 % kategori predikat Cukup, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja.
16. Sasaran Terbukanya isolasi daerah sekaligus menunjang pembangunan potensi kepariwisataan dengan capaian 27,77 % kategori predikat Sangat Kurang, dengan 6 (enam) Indikator Kinerja.
17. Sasaran Meningkatnya iklim investasi daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah dengan capaian 60,91 % kategori predikat Baik, dengan 6 (enam) Indikator Kinerja.
18. Sasaran Meningkatnya daya saing dan menjaga stabilitas ekonomi lokal dengan capaian 97,51 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja.

Dengan hasil pencapaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh aparatur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dengan melengkapi setiap kekurangan dan memperbaiki setiap kesalahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pronsip-prinsip *Good Governmance* demi mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xiv

## **BAB I. PENDAHULUAN**

**1**



A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi .....	4
C. Maksud dan Tujuan .....	6
D. Permasalahan Utama Tahun 2023 .....	7
E. Sistematika Penyajian .....	8

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

**9**



A. Perencanaan Strategis .....	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	11

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

**14**



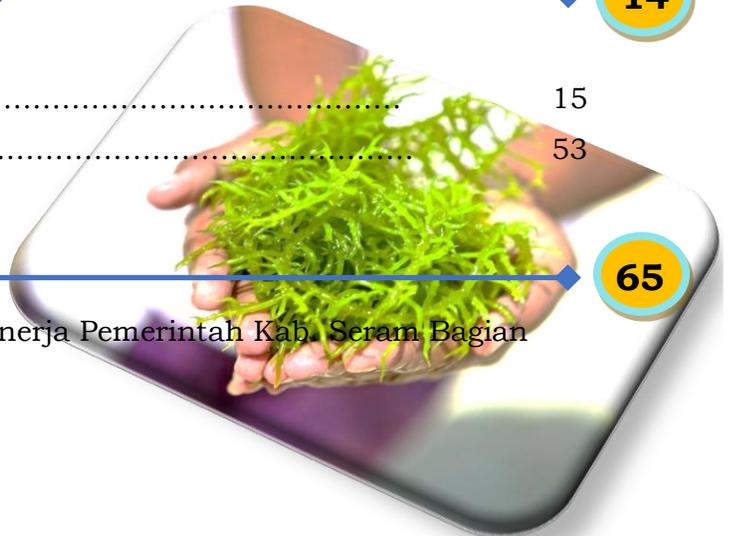
A. Capaian Kinerja .....	15
B. Realisasi Anggaran .....	53

## **BAB IV. PENUTUP**

**65**



Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	
--	--

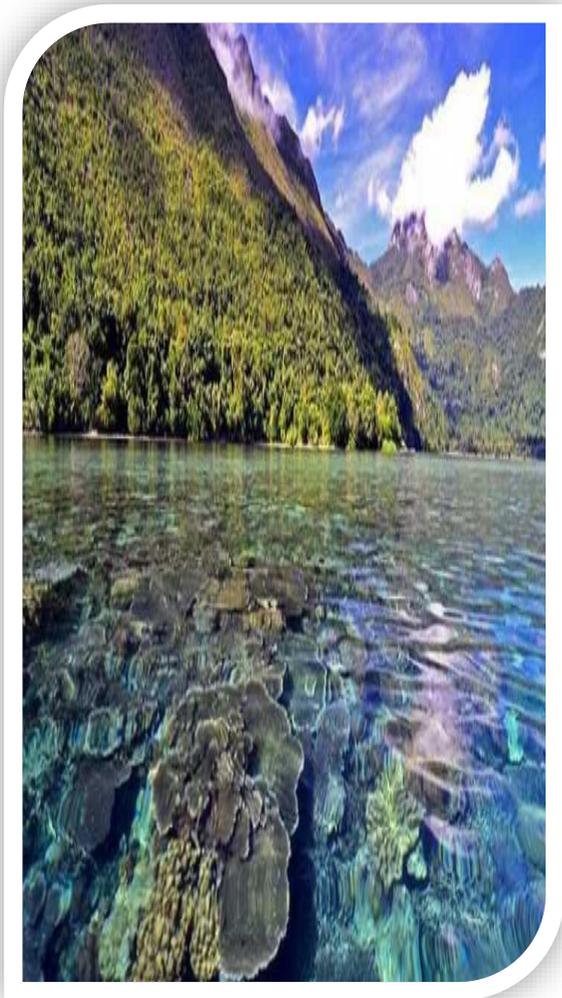




Tabel 2.1	Tujuan Kabupaten Seram Bagian Barat.....	10
Tabel 2.2	Perjanjian Jinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat .....	12
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja Berdasarkan Permen PAN - RB Nomor 12 Tahun 2015 .....	16
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seram Bagian Barat .....	17
Tabel 3.3	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 Dengan Tahun 2021 – 2022 .....	19
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 Dengan Target Akhir RPD .....	21
Tabel 3.5	Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya .....	42
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Per OPD Tahun 2023 .....	44
Tabel 3.7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 .....	48



Grafik 3.1	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten seram Bagian Barat tahun 2020 – 2023 .....	23
Grafik 3.2	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2023.....	24
Grafik 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten seram Bagian Barat menurut lapangan usaha tahun 2023 .....	26
Grafik 3.4	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2021 - 2023 .....	28
Grafik 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2021 - 2023 .....	32
Grafik 3.6	Perbandingan Realisasi Pembentukan BUMDes di Kabuoaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD .....	35
Grafik 3.7	Penerima Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023.....	37
Grafik 3.8	Realisasi Indeks Resiko Bencana kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 terhadap target RPD .....	39
Grafik 3.9	Perbandingan Pertumbuhan Gender di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2022 – 2023 .....	41
Grafik 3.10	Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 terhadap target RPD .....	44
Grafik 3.11	Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat .....	47



# PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa Tuntutan (good governance and clean government) merupakan prayarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta citacita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas

agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme..

## **A. Latar Belakang.**

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Permerintah (SAKIP) dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja berupa informasi kinerja meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

## **B. Dasar Tugas Pokok, dan Fungsi Serta Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Seram Bagian Barat yang diwadahi dalam bentuk Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan. Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat digambarkan sebagai berikut :

### **1. Sekretariat Daerah**

Dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Di bawah Sekretariat Daerah terdapat 3 (tiga) Asisten yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum.

**1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja sama; Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan Bagian Hukum.

Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)

**2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bagian Administrasi Pembangunan; dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Masing-masing Bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)

**3) Asisten Administrasi Umum.**

Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan; Bagian Organisasi; dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Masing-masing bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam koordinasi Asisten Administrasi Umum (Asisten III).

## **2. Sekretariat DPRD**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **3. Dinas-Dinas Daerah**

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi Desentralisasi dan Tugas Pembantuan untuk bidang-bidang pembangunan tertentu seperti Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perhubungan dan Kominfo, Pariwisata Dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum, Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Pertanian dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Pendapatan Pengelola dKeuangan Dan Aset Daerah serta Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

#### 4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah berbentuk Inspektorat Daerah, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dibentuk sesuai Peraturan Daerah, sebagai unsur penunjang yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk bidang-bidang tertentu.

##### *a. Inspektorat*

Inspektorat adalah perangkat teknis daerah, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

##### *b. Badan*

Badan adalah perangkat teknis daerah yang diserahkan wewenang tugas, dan tanggungjawab untuk menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah dibidang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berjumlah 6 (enam) yaitu Badan Perencanaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

##### *c. Rumah Sakit Umum Daerah*

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD PIRU), merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu, dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai akses penunjang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di

kabupaten kami, sudah terdapat 22 puskesmas yang beroperasi dan tersebar di 92 Desa.

### **5. Kecamatan**

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat-Camat berfungsi sebagai Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan yang berada dalam Pemerintahan Kabupaten Seram Barat ada 11 (sebelas) yaitu : Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual Depan, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Elpaputih, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Waesala dan Kecamatan Manipa.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diarahkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggung jawab. Pengukuran kinerja merupakan gambaran sejauh mana Pemerintah Daerah mempunyai komitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan, sehingga kinerjanya dapat diukur dengan baik. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dapat atau tidak dapat dicapai pada akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja.** Bagi keperluan eksternal organisasi, LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 merupakan sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023.
- **Aspek Manajemen Kinerja.** Bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP tahun 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Daerah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.

#### **D. Permasalahan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat**

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan daerah integral dari wilayah Provinsi Maluku dan merupakan Kabupaten Bahari, yang terdiri dari 11 Kecamatan dan dipisahkan oleh 67 Pulau. Secara Astronomis, Kabupaten Seram Bagian Barat terletak antara 1°19' - 7°16' Lintang Selatan dan antara 127°20' - 129°1' Bujur Timur.

Permasalahan pembangunan yang menjadi kesenjangan antara target dan harapan dalam dokumen perencanaan dengan realitas di lapangan. Permasalahan yang akan muncul kemudian dielaborasi dengan berbagai lingkungan strategis bersifat yang membawa potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Lingkungan strategis yang menjadi bahan pertimbangan antara lain isu internasional, nasional, provinsi maupun daerah sekitar Kabupaten Seram Bagian Barat.

Elaborasi antara permasalahan pembangunan di setiap kategori antara lain Sumberdaya Manusia (SDM), Ekonomi, Infrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan dan Sosial yang akan di mapping dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan baik yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar, dan wajib yang bukan pelayanan dasar, serta urusan pilihan yang menjadi sektor unggulan serta potensi daya saing daerah, yang menjadi isu strategis yang harus diintervensi dan akan terus didorong

menjadi rumusan tujuan serta sasaran strategi dan arah kebijakan atau disebut metode fold grand cascading.

#### **D. Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2023**

Sistematika penyajian LKIP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab 1 - **Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

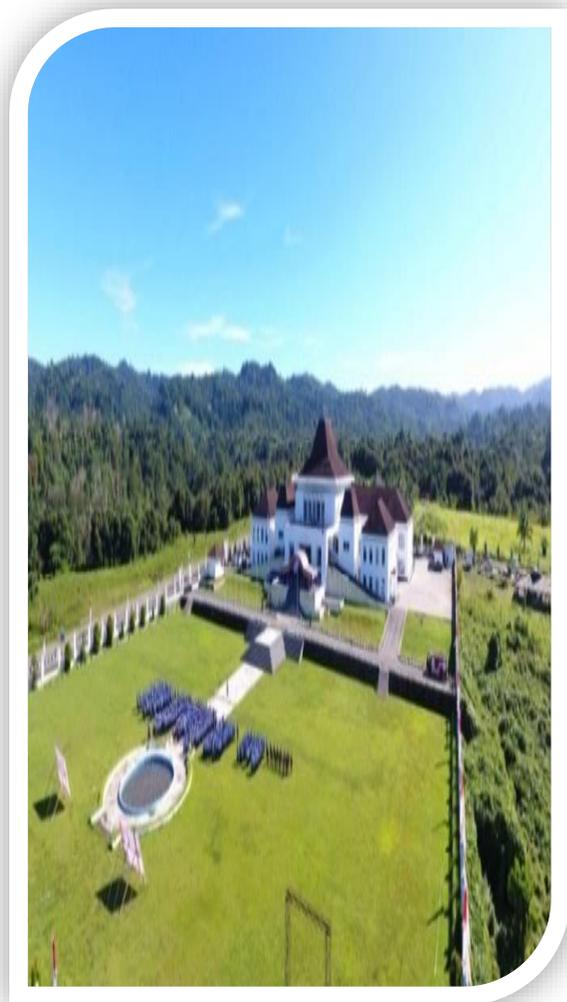
Bab 2 - **Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab 3 - **Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini diuraikan *Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran*.

BAB 4 - **Penutup**



# PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## A. Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Tabel 2.1. Tujuan Kabupaten Seram Bagian Barat

Sektor	Tujuan	Indikator	Respon Terhadap Isu Strategis
Sumber daya Manusia	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi</li> <li>Menurunnya kemiskinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laju Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>Tingkat Kemiskinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya pertumbuhan ekonomi</li> <li>Rendahnya kesejahteraan masyarakat</li> </ol>
Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Meningkatnya Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Infrastruktur</li> <li>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ol>	Belum optimalnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat</li> <li>Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> <li>Indeks Resiko bencana</li> <li>Indeks Pembangunan Gende</li> </ol>	Belum Optimalnya ketahanan sosial masyarakat

Sektor	Tujuan	Indikator	Respon Terhadap Isu Strategis
	3. Menurunnya kesenjangan gende		
Tata kelola pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan</li> <li>2. Optimalisasi kemandirian desa</li> <li>3. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Indeks Desa Membangun</li> <li>3. Angka Konflik Sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>2. Belum optimalnya kemandirian desa</li> <li>3. Masih adanya potensi konflik sosial</li> </ol>

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja yang dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat hanya diprioritaskan pada 13 (tiga belas) indikator seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,67
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,44
3.	Menurunnya Kemiskinan	3. Tingkat Kemiskinan	Persen	24,95
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,09
4.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah yang berkelanjutan	5. Indeks Infrastruktur	Indeks	75,03
		6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,40
5.	Meningkatnya Keberadaan Sosial Masyarakat	7. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka	16,39
6.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Bencana	8. Indeks Resiko Bencana	Indeks	172,81
7.	Menurunnya Kesenjangan gender	9. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,62

<b>No.</b>	<b>Tujuan/Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
8.	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan	10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,67
		11.	Opini BPK		WTP
		12.	Nilai SAKIP	Nilai	B (60)
		13.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	77,5
9.	Mengoptimalisasi Kemandirian Desa	14.	Indeks Desa Membangun / Mandiri	Jumlah	10
10.	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	15.	Angka Konflik Sosial	Angka	2,00



## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik. Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

## A. Capaian Kinerja

### A.1 Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pengukuran capaian kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2023 dilakukan secara berkala serta telah mendasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2023. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap), selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan tingkat capaian setiap sasaran adalah :

- a. Tingkat capaian positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Tingkat capaian negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran strategis pembangunan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal.

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kerja**  
**Berdasarkan Permen PAN - RB Nomor 12 Tahun 2015**

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1.	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	> 80 – 90	Memuaskan
3.	> 70 – 80	Sangat Baik
4.	> 60 – 70	Baik
5.	> 50 – 60	Cukup
6.	> 30 – 50	Kurang
7.	0 – 30	Sangat Kurang

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan.

## A.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan kepada setiap stakeholders maupun instansi penilai kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2023.

Adapun hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis untuk menunjang Tujuan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	T	R	C (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,67	71,67	107,49
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,44	4,67	85,85
3.	Tingkat Kemiskinan	Persen	24,95	22,39	110
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,34	4,73	100
5.	Indeks Infrastruktur	Indeks	75,03	67,82	90,39
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,40	77,95	94,60

No	Indikator Kinerja	Satuan	T	R	C (%)
7.	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka	16,39	19,50	68,48
8.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	172,81	159,51	108,34
9.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,62	64,77	63,87
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,67	25,74	33,57
11.	Opini BPK		WTP	WDP	66,67
12.	Nilai SAKIP	Nilai	B (60)	50,57	84,28
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,5	65,73	84,81
14.	Indeks Desa Membangun / Mandiri	Jumlah	10	9	90
15.	Angka Konflik Sosial	Angka	2	1	200
<b>Rata - Rata (%)</b>					

*T : Target*

*R : Realisasi*

*C : Capaian (%)*

### **A.3 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Tahun 2022 dan 2021**

Perbandingan capain kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seram**  
**Bagian Barat Tahun 2023 dengan Tahun 2021 – 2022**

No	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
		R	C	R	C	R	C
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,83	-	66,67	-	71,67	107,49
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-	-	3,40	-	4,67	85,85
3.	Tingkat Kemiskinan	25,27	-	22,25	-	22,39	110
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,14	98	7,19	98,17	4,73	100
5.	Indeks Infrastruktur	-	-	-	-	67,82	90,39
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	77,95	94,60
7.	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	-	-	-	19,50	68,48

No	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
		R	C	R	C	R	C
8.	Indeks Resiko Bencana					159,51	108,34
9.	Indeks Pembangunan Gender					64,77	63,87
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	25,74	33,57
11.	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	66,67
12.	Nilai SAKIP	49,09	98	50,20	83,66	50,57	84,28
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	69,81	96	95,01	100	65,73	84,81
14.	Indeks Desa Membangun / Mandiri					9	90
15.	Angka Konflik Sosial	-	-	4	99,04	1	200

T : Target

R : Realisasi

C : Capaian (%)

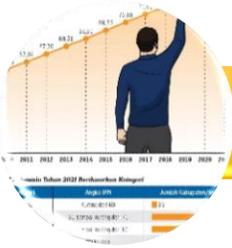
#### A.4 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Pada Dokumen Perencanaan Daerah

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 dengan tahun sebelumnya terhadap target jangka menengah pada dokumen perencanaan daerah ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD**

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			Target
		2021	2022	2023	RPD
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,90	70,76	71,67	67,71
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-	3,40	4,67	6,50
3.	Tingkat Kemiskinan	25,27	22,25	22,39	24,67
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,14	7,19	4,73	5,82
5.	Indeks Infrastruktur			67,82	90,62
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			77,95	86,3

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			Target
		2021	2022	2023	RPD
7.	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			19,50	15,21
8.	Indeks Resiko Bencana			159,51	175,44
9.	Indeks Pembangunan Gender			64,77	98,69
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	25,74	77,16
11.	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP
12.	Nilai SAKIP	49,09	50,20	50,57	90 (A)
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	69,81	95,01	65,73	87
14.	Indeks Desa Membangun / Mandiri			9	16
15.	Angka Konflik Sosial	-	4	1	0



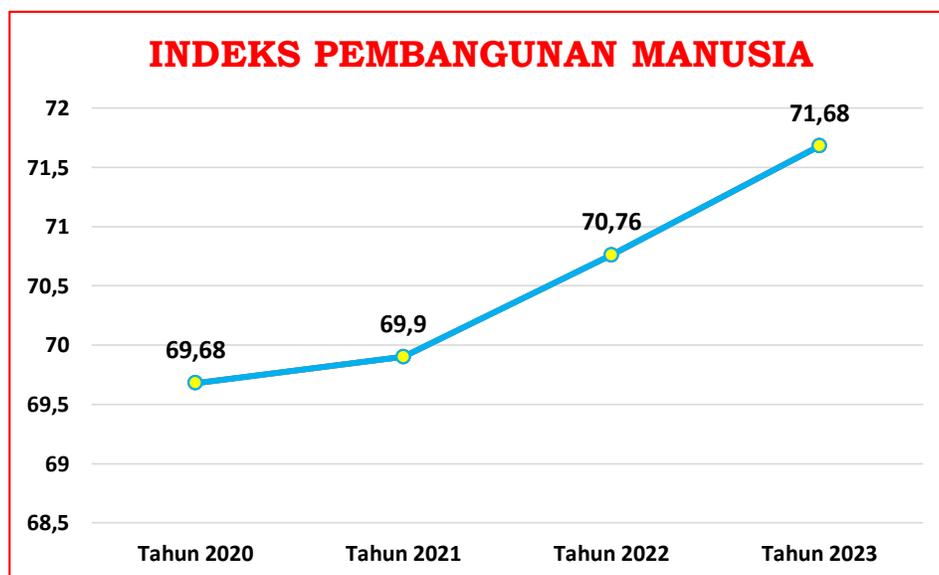
## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

**I**ndeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 capaian IPM sebesar 71,68 meningkat 5,01 % dari tahun sebelumnya yaitu 66,67.

**Grafik 3.1**

**Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Seram Bagian Barat dari tahun 2020 - 2023**



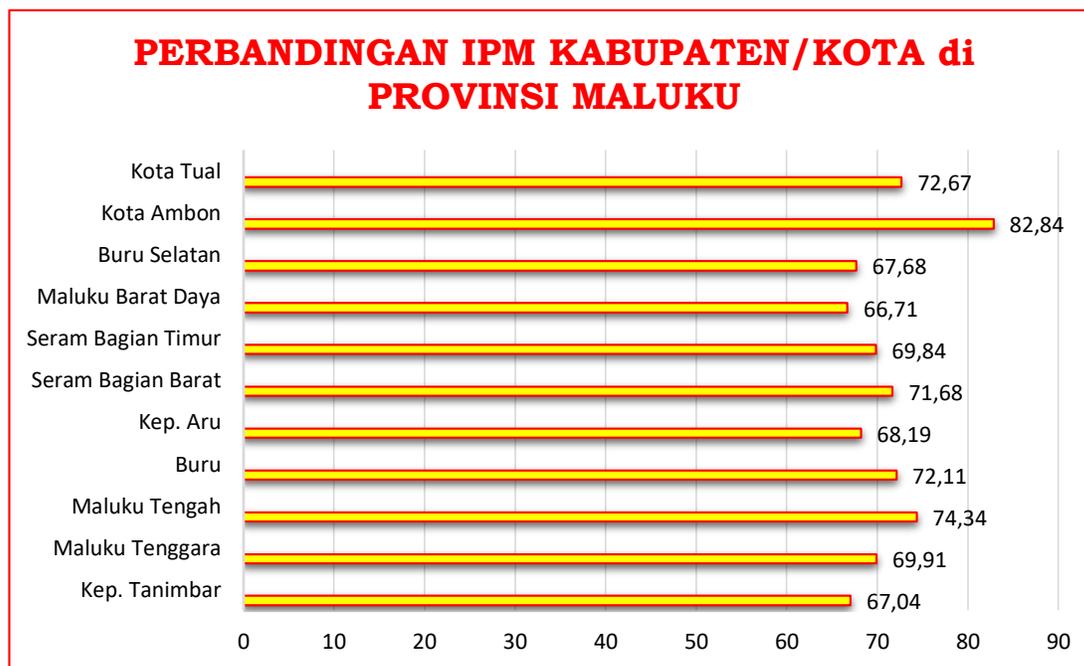
Sumber data : Badan Statistik Kab.SBB dan Badan Perencanaan Daerah Kab. SBB

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Di provinsi Maluku sendiri, IPM mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Pembangunan manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, IPM 60-70 kategori sedang serta IPM < 60 kategori rendah

### Grafik 3.2

#### Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

Tahun 2023



Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab.SBB

Jika berdasarkan kriteria UNDP, maka IPM Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada kategori tinggi, hal ini menunjukkan pembangunan

manusia Kabupaten Seram Bagian Barat terus meningkat. Berdasarkan target indikator pada Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka realisasi pencapaian IPM telah mencapai 100% dari target yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar 66,67.

Namun untuk mempercepat pembangunan manusia di Kabupaten Seram Bagian Barat secara merata maka prioritas utama pembangunan manusia harus difokuskan pada klaster rendah dengan cara meningkatkan kerjasama antar wilayah kecamatan/desa yang maju dan tertinggal, perbaiki konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui perbaikan infrastruktur jalan raya dan memperlancar arus barang/jasa. Salah satu isu penting lainnya dalam pengembangan indeks komposit pembangunan manusia adalah cakupan indikator indeks pembangunan manusia yang masih relative rendah.



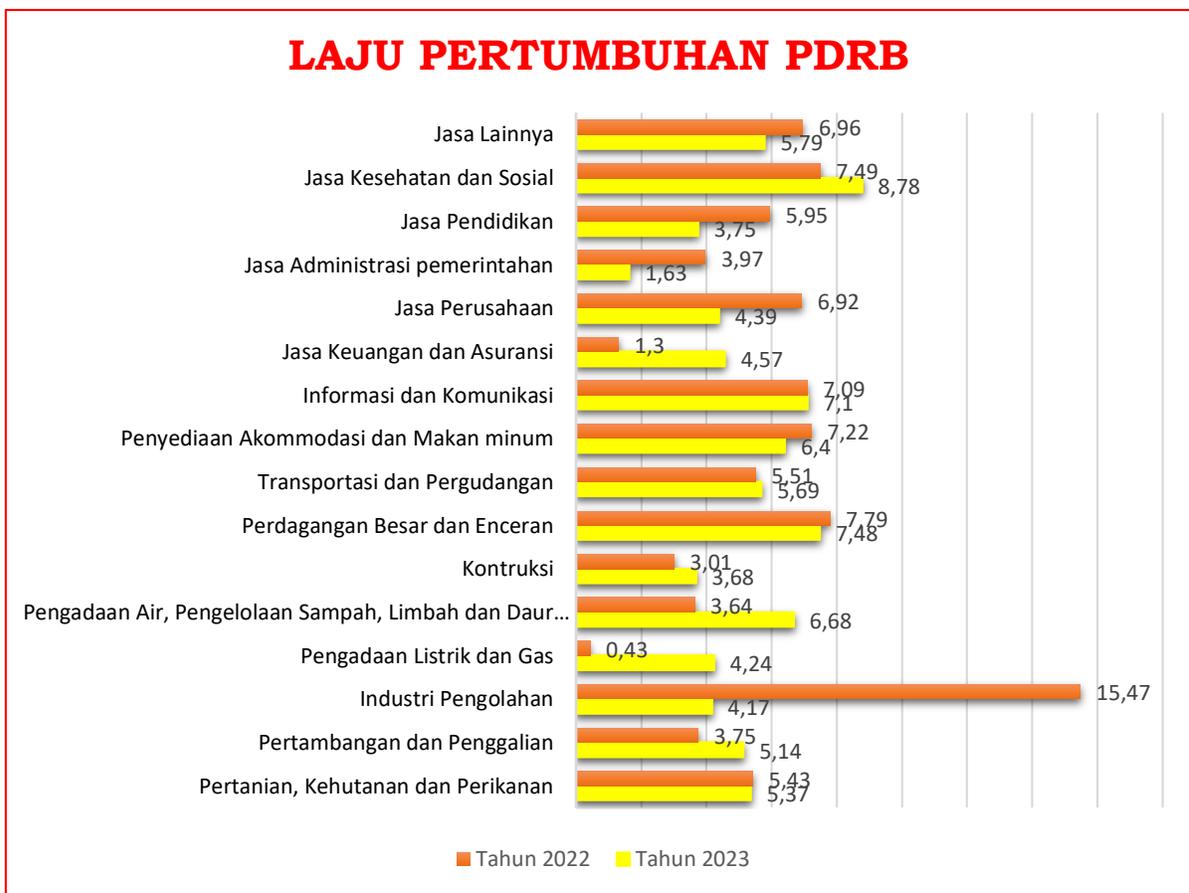
## LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

**L**aju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 capaian LPE sebesar 5,63 atau meningkat 2,23 % dari tahun sebelumnya yaitu 3,40. Bila dilihat pertumbuhan PDRB menurut sektor dari yang tertinggi ke yang

terendah, maka pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,78 persen dan terendah ada pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,63 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di wilayah regional dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

**Grafik 3.3**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023**



Sumber data : Badan Pusat Statistik dan Badan perencanaan Daerah Kab.SBB

Pembangunan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat diukur sejauh mana perkembangan suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut, karena makin tinggi PDRB suatu daerah berarti tingkat kegiatan perekonomian di daerah tersebut juga tinggi demikian juga sebaliknya. Jika Berdasarkan target indikator pada Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka realisasi pencapaian LPE telah mencapai 100% dari target yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar 5,44.

Berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Seram Bagian Barat, diharapkan pemerintah merumuskan strategi pengembangan wilayah yang paling menguntungkan untuk diterapkan di masa mendatang dengan mengutamakan sektor – sektor unggulan yang ada, namun tidak juga mengabaikan sector – sector non unggulan sehingga diharapkan semua sektor dapat saling mendukung dalam peningkatan potensi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Barat



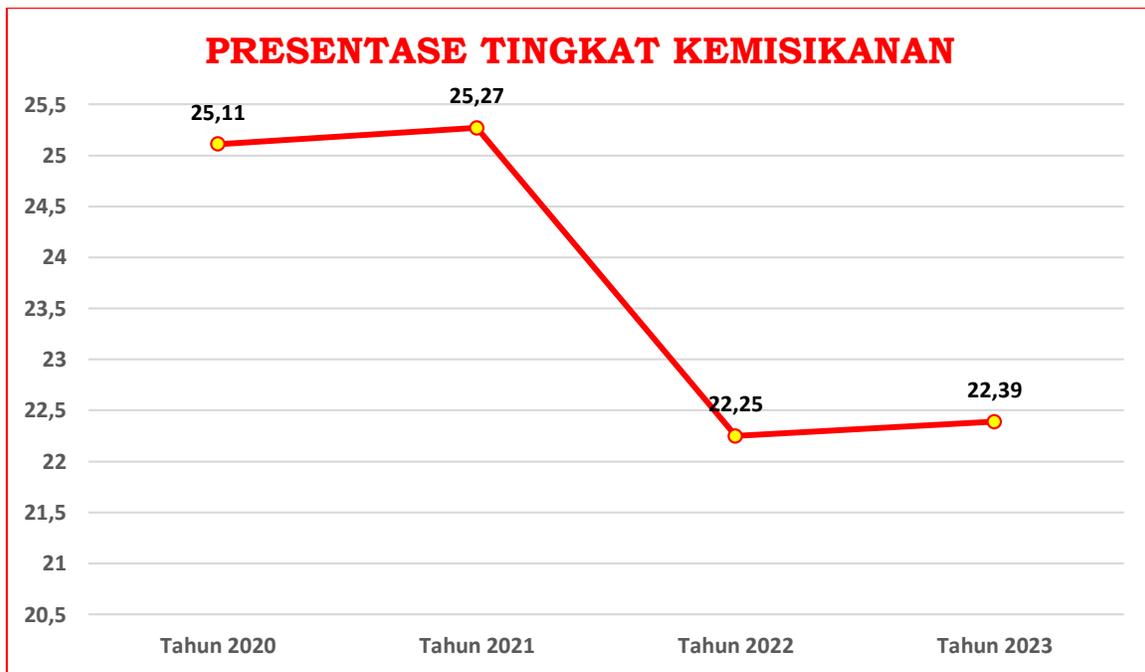
## TINGKAT KEMISKINAN

**T**ingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Perhitungan pencapaian indikator kinerja pada Tingkat Kemiskinan yaitu menggunakan tingkat pencapaian negative. Berdasarkan target indikator pada Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka

realisasi pencapaian Tingkat Kemiskinan telah mencapai 100% dari target yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar 24,95%., dimana tingkat kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat dapat ditekan dibawah target yaitu 22,39.

Namun jika dilihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,14%, dimana tahun sebelumnya tingkat kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 22,25 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 22,39 (dapat dilihat pada grafik 3.4).

**Grafik 3.4**  
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat**  
**Dari Tahun 2021 – 2023**



Sumber data : Badan Pusat Statisti dan Badan perencanaan Daerah Kab.SBB

Naiknya presentase tingkat kemiskinan sebesar 0,14% pada Kabupaten Seram Bagian Barat, disebabkan karena beberapa factor seperti factor kebijakan pemerintah. Imbas dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan naiknya biaya produksi sehingga mempengaruhi harga-harga baik kebutuhan pokok (pangan) maupun kebutuhan non pangan menjadi naik. Karena naiknya harga kebutuhan pokok terutama beras menyebabkan responden tidak mengkonsumsi nasi secara rutin, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya harus diselingi dengan mengkonsumsi umbi-umbian seperti ubi kayu, dan keladi. Serta adanya kenaikan harga pasar yang tidak seimbang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menjalankan program Raskin (Beras untuk masyarakat miskin). Selain raskin, juga terdapat program BLT, program pembangunan desa yang dimulai dari pembangunan kesejahteraan keluarga. Program – program tersebut masih dianggap belum efektif karena belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena tidak semua masyarakat menjadi penerima bantuan tersebut. Selain itu juga rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kesempatan mengakses pekerjaan formal menjadi sangat terbatas, akibatnya pekerjaan pada sektor informal yang menjadi pilihan untuk memperoleh penghasilan. dalam memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada pada sektor informal dibutuhkan modal. Hal ini sebanding dengan menurunnya PDRB di bidang industri dan perdagangan.

Untuk mengatasi hal – hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyusun beberapa strategi penanggulangan kemiskinan sebagai berikut :

1. Pengembangan pada sektor pertanian, melalui penyediaan sarana produksi seperti bibit, peralatan, pupuk organic, pakan ternak dan sebagainya. Dan juga penyediaan tenaga penyuluh lapangan.

2. Program pengelolaan perikanan tangkap untuk pengembangan kapasitas nelayan kecil, pemberian bantuan sarana penangkapan ikan. Serta peningkatan SDM seperti pelatihan pengembangan olahan perikanan.
3. Pelestarian objek wisata yang dapat dijadikan untuk menarik perhatian investor dan wisatawan sehingga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, artinya bahwa dengan adanya investor dan berbagai wisatawan yang datang berkunjung ke tempat wisata tersebut dapat memberi kesempatan pekerjaan bagi masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.
4. Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola secara cepat dan tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan.
5. Pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) secara tepat untuk membantu mengurangi biaya pengeluaran untuk pendidikan anak terutama pada anak yang memiliki orang tua yang tergolong miskin.
6. Program peningkatan usaha kecil dan mikro, guna meningkatkan pendapatan masyarakat.
7. Kualitas infrastruktur jalan, alat pertanian dan sarana pasar yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat perlu di tingkatkan.

Diharapkan langkah – langkah strategis ini dapat menekan tingkat kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat.



## TINGKAT PENGANGGURAN (TPT)

**T**ingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung dengan menjumlahkan pengangguran terbuka usia angkatan kerja di bagi jumlah penduduk angkatan kerja dikalikan seratus persen.

**Grafik 3.5**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seram Bagian Barat  
Dari Tahun 2021 – 2023**



Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan tenaga Kerja Kab.SBB

Berdasarkan dokumen Perencanaan Daerah kabupaten Seram Bagian Barat, maka target Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 yaitu 4,34 dengan realisasi sebesar 4,73 atau pencapaian sebesar 100%. Berdasarkan perbandingan dengan tahun sebelumnya terlihat adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 7,19 atau terjadi penurunan sebesar 2,46 %. Artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berhasil menekan tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya sebesar 2,46%. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Seram Bagian Barat disebabkan karena adanya program program pemerintah daerah terkait pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja sebanyak 250 peserta dan pengadaan sarana dan prasarana terhadap 250 peserta. Program pelatihan terdiri dari Pelatihan Pertukangan Mebel, Pelatihan Percetakan, Pelatihan Aneka Kuliner, Pelatihan Perbengkelan serta Pelatihan terkait *Event Organizer*.

Setelah melakukan pelatihan dan diimbangi dengan sarana dan prasarana, maka peserta sudah dapat menciptakan atau membentuk kelompok-kelompok kerja/usaha, bahkan ada peserta yang telah bergabung dengan perusahaan penerima tenaga kerja (baik itu BUMD, BUMS atau BUMN).



## INDEKS INFRASTRUKTUR

**P**enilaian kondisi infrastruktur, meliputi ketersediaan dan kondisinya, pada Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai salah satu kabupaten yang sedang berkembang di Provinsi Maluku sangatlah penting. Mengingat begitu pentingnya ketersediaan aksesibilitas

berbagai infrastruktur layanan publik tersebut dengan kondisi baik dan memadai bagi berjalannya kehidupan bermasyarakat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan perekonomian masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terus melakukan upaya dalam peningkatan kualitas infrastruktur publik.

Berdasarkan target indikator pada Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka realisasi Indeks Infrastruktur mencapai 67,82% dari target yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar 75,03%., dimana tingkat pencapaian sebesar 90,39 dengan kategori memuaskan.

Kegagalan belum tercapainya target indikator kinerja tersebut dikarenakan beberapa hal : -

1. Kurangnya Alokasi Anggaran dalam mencapai target indikator tersebut;
2. Terdapat beberapa Program dalam indikator pada RPD yang tidak dapat dilaksanakan diakibatkan tidak dilakukannya program relokasi oleh pemerintah;
3. Masalah Pertanahan yang tidak memiliki status kejelasan;
4. Lokasi Masing – Masing Desa yang aksesnya sulit dijangkau.

Dari penyebab kegagalan pencapaian target indikator sasaran, maka perlu dilakukan tindakan peningkatan untuk mencapai hasil yang maksimal pada tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui dinas Pekerjaan Umum dan dinas Perumahan akan berusaha untuk memaksimalkan kinerja demi mencapai keberhasilan. Adapun hal – hal yang akan dilakukan yaitu :

1. Melakukan pelaksanaan program dalam mendukung capain Indeks Kinerja RPD tahun 2023;

2. Program Rumah Layak bagi Korban Rumah bencana yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Cakupan Infrastruktur Pelayan dasar dapat dilaksanakan dengan baik dan Tepat waktu.
3. Koordinasi dan Pendataan serta Pemetaan Batas Tanah ulayat terlaksana dengan baik yang mendukung indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.
4. Program Perencanaan Penyedia PSU Perumahan terlaksana dengan baik yang mendukung salah satu indikator Indeks Infrastruktur



## KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

**I**ndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintrodukir sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Konsep ini merupakan penerapan konsep Environmental Performance Index (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

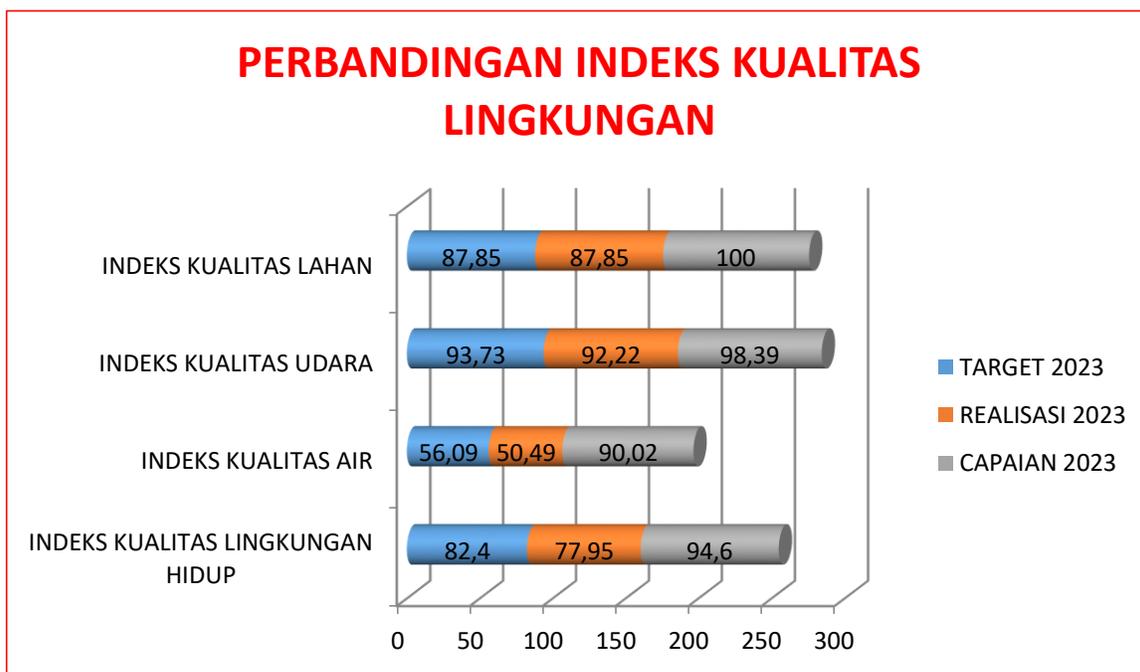
Sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan lahan, serta kelestarian ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup ini dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 dengan target 82,40 dan realisasi 77,954, dan nilai IKLH diukur

dengan tiga indikator kinerja indeks kualitas air (IKA) dengan target 56.09 dan realisasi 50,49, indeks kualitas udara (IKU) dengan target 93,73, dan realisasi 92,22 serta indeks kualitas lahan (IKL) dengan target 87.85 dan realisasi 87.85.

Realisasi pada indikator ” **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**” adalah Sebesar 82,4 dimana target indikator kinerja ini adalah 77,95 dengan capaian indikator ini adalah sebesar 94,6% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Realisasi pada indikator ” **Indeks Kualitas Air**” adalah Sebesar 50,49 dimana target indikator kinerja ini adalah 56,09 dengan capaian indikator ini adalah sebesar 90,02% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

**Grafik 3.6**  
**Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan**  
**Kabupaten Seram Bagian Barat**



Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kab.SBB

Realisasi pada indikator ” **Indeks Kualitas Udara**” adalah Sebesar 92,22 dimana target indikator kinerja ini adalah 93,7 dengan capaian indikator ini adalah sebesar 98,39% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan. Realisasi pada indikator ” **Indeks Kualitas Lahan**” adalah Sebesar 87,85 dimana target indikator kinerja ini adalah 87,85 dengan capaian indikator ini adalah sebesar 100% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan. Adapun strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada tahun mendatang adalah perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan.

Dilihat dari pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang **Sangat Mumuaskan** terlihat jelas bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan keberhasilan pembangunannya dan sudah berusaha secara maksimal melaksanakan Kebijakan dan Program-program yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan – kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.



## ANGKA PMKS

**P**enyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin

hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat Mengelompokan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi menjadi 5 bagian yaitu fakir miskin, korban bencana alam, korban bencana sosial, anak yang berhadapan dengan hukum dan DISABILITAS (Penerima Bantuan). Dengan menggunakan Rumus Perhitungan semakin rendah Realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapai kinerja (**Progress Negatif**),

**Grafik 3.7**  
**Penerima Bantuan PMK Kabupaten Seram Bagian Barat**  
**Tahun 2023**



Sumber data : Dinas Sosial Kab.SBB

Realisasi pada indikator **“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”**” adalah Sebesar 19,57 dimana target indikator kinerja ini adalah 16,39 dengan capaian indikator ini adalah sebesar 68,48% dengan kategori kriteria target kinerja adalah baik.

Keberhasilan penekanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimana Target Penerima Bantuan PMKS Tahun 2023 sebesar 635 orang dengan tingkat Realisasinya adalah sebanyak 523 orang dengan demikian penekanan tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial hanya tersisa 112 orang. Keberhasilan ini tidak terlepas karena dukungan dari kementerian sosial melalui balai kesejahteraan sosial lewat pemberian bantuan dan atensi.



## INDEKS RESIKO BENCANA

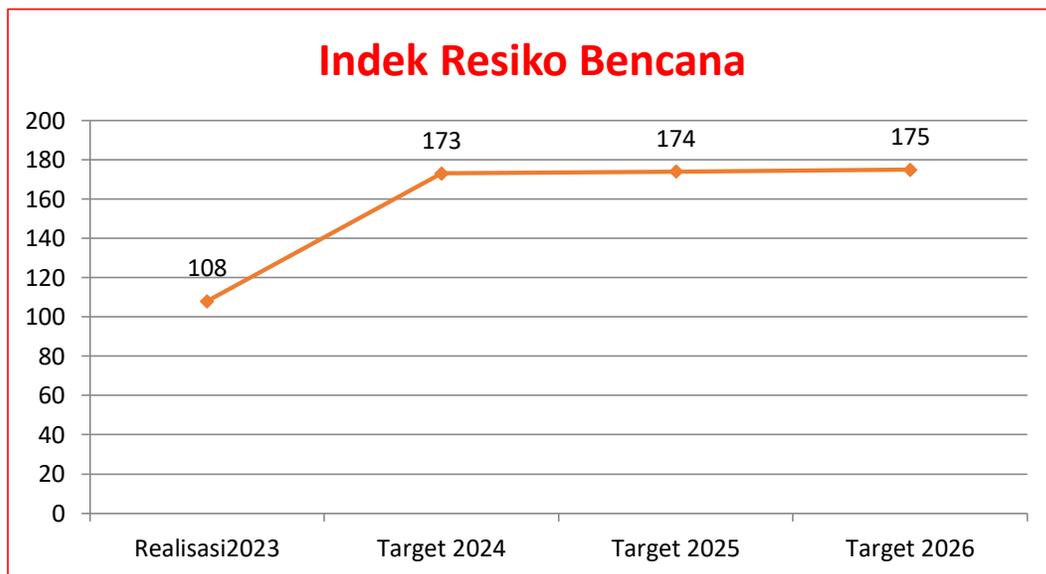
**P**enanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan Pembangunan Nasional dan Daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila yang juga diamanatkan dalam Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Perhitungan Indeks Risiko Bencana menjadi bagian penting dari skenario dan proyeksi perencanaan pembangunan yang lebih baik. Tanpa adanya IRB, maka para perencana dan program pembangunan, serta kegiatan pemerintah akan kesulitan melakukan strategi.

Penghitungan IRB dalam hal ini akan menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah, terkait penghitungan IRB dianggap sangat penting dalam menyusun rencana pembangunan maka para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing akan memiliki fundamen kebijakan dalam penanggulangan bencana secara terukur. Indeks Risiko Bencana ini dihitung berdasarkan rumus = Vulnerability Risk = Hazard x Capacity Bahaya (hazard)

**Grafik 3.8**  
**Realisasi Indeks Resiko Bencana Kabupaten Seram Bagian Barat**  
**Tahun 2023 Terhadap Target RPD**



Sumber data : Badan Penanggulangan Daerah Kab.SBB

Realisasi pada indikator Indeks Resiko Bencana dimana Target pada Indikator kinerja Utama ini adalah 172,82 dan Realisasi kinerja di Tahun 2023 adalah 108,34 dengan capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 62,69% dengan kategori kriteria target kinerja adalah baik walaupun tidak memenuhi target.

Pencapaian Realisasi Indeks Resiko Bencana Tahun 2023 yang tidak mencapai target adalah suatu hal yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah sebagai langkah tindaklanjut untuk pencapaian Target Indeks Resiko Bencana pada Tahun 2024, 2025 dan 2026 kedepannya. Hal mendasar yang menjadi kendala adalah Tidak Terlaksananya Program Kegiatan Penunjang Bencana di sebabkan Karena Terbatasnya Anggaran. Menindaklanjuti Kendala tersebut di perlukan adanya Program2 Kegiatan Penunjang Urusan Bencana agar Target Kedepan bisa di tercapai.



## INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

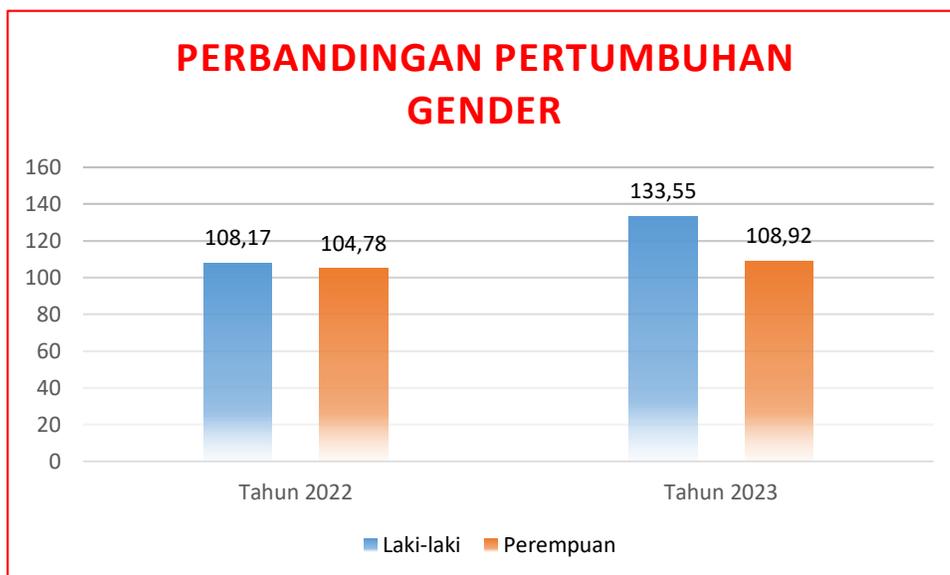
**S**elama ini, isu-isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama apabila berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Padahal sejatinya, kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan peran sosial, ekonomi, dan

politik antara laki-laki dan perempuan. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki.

IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. Oleh karena itu, IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Target Indikator Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 sebesar 98,62% maka Realisasinya hanya sebesar 63,87% dimana capaian yg di peroleh hanya 64,77% ini menandakan bahwa Indeks Pembangun Gender Pada Kabupaten Seram Bagian Barat tidak mencapai target yang telah di tentukan walaupun masuk kategori kriteria target kinerja adalah baik.

**Grafik 3.9**  
**Perbandingan Pertumbuhan Gender di Kabupaten Seram Bagian Barat**  
**Tahun 2022 - 2023**



Sumber data : Badan Pusat Statisti dan Badan perencanaan Daerah Kab.SBB

Indeks pembangunan gender merupakan indeks capaian yang menggambarkan kondisi pembangunan manusia berbasis gender. Indeks ini dapat menggambarkan baik buruknya kesenjangan gender yang terjadi di suatu daerah.

Semakin tinggi nilai indeksnya maka semakin baik kondisi kesetaraan gendernya. Indeks ini dihitung dari beberapa sektor yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indikator yang digunakan yaitu *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR), persentase APBD untuk program kependudukan dan keluarga berencana, persentase anggaran perempuan terhadap APBD dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan.

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Seram Bagian Tahun 2023 mengalami Perbaikan Dimana Target sebesar 98,62 pencapaian sebesar 64,77 tingkat realisasi sebesar 63,87% dengan kategori kriteria target kinerja adalah baik. Meskipun masih belum memenuhi target yang telah ditentukan tetapi jika melihat grafik tahun 2021 dan tahun 2022 yang tingkat realisasinya 0, maka bisa dipastikan tahun 2023 mengalami perbaikan Indeks Pembangunan Gender.

Kendala utama belum tercapainya Target Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Tidak adanya anggaran untuk memenuhi target yang dilakukan. Pengalokasian Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Baru di anggarkan Pada Tahun 2024 ini. Dimana Indeks Pembangunan Gender Hanya akan di terapkan pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Kairatu dan Kecamatan Kairatu Barat.



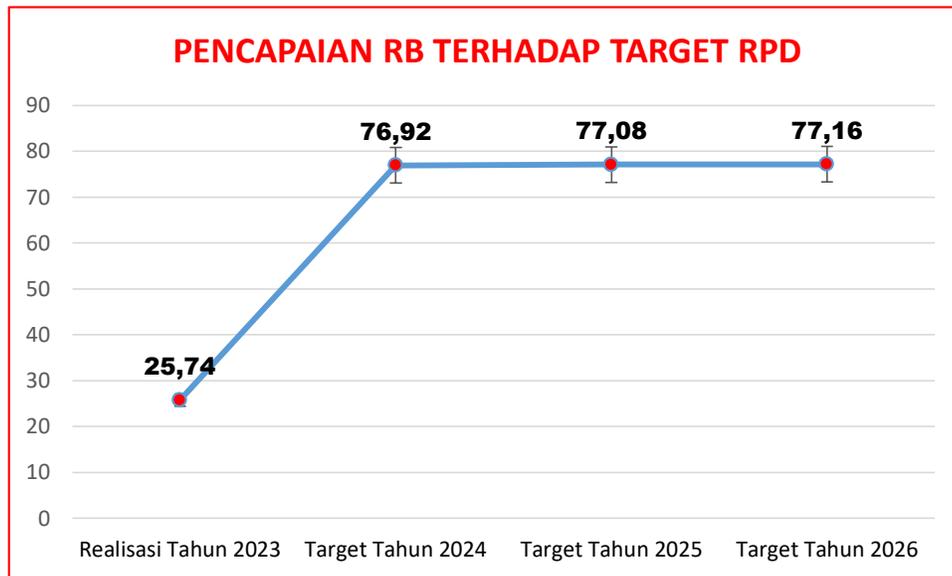
## INDEKS REFORMASI BIROKRASI

**I**ndeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan target indikator pada Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 33,57% dimana realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebesar 25,74 dari target yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar 76,6. Sedangkan pada tahun tahun sebelumnya belum dilakukan penilaian Reformasi Birokrasi dan hanya terfokus pada penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP).

Pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah dilaksanakan dari tahun 2019 berdasarkan Road-Map Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 – 2024. Namun progress Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Evaluasi PMPRB tidak berjalan dengan baik. Hal ini diakibatkan karena minimnya SDM yang paham tentang progres PMPRB.

**Grafik 3.10**  
**Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat**  
**Tahun 2023 Terhadap Target RPD**



Sumber data : Sekretariat Daerah Kab.SBB

Pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah dilaksanakan dari tahun 2019 berdasarkan Road-Map Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 – 2024. Namun progress Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Evaluasi PMPRB tidak berjalan dengan baik. Hal ini diakibatkan karena minimnya SDM yang paham tentang progres PMPRB.

Adapun hal – hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu :

1. Membentuk Tim Pengarah dan Pelaksanaan RB yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 725 – 440.8 Tahun 2023;
2. Membentuk Tim PMP RB yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 188.4 – 40 Tahun 2023;

3. Meningkatkan SDM terkait pelaksanaan dan penilaian RB pada Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang disampaikan oleh Kementrian PANRB, maka Pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mengumpulkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah untuk mengikuti Evaluasi Sasaran Implementasi Pelaksanaan RB.



**OPINI BPK. RI**

**O**pini Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

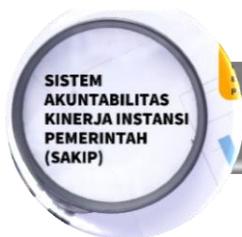
Berdasarkan dokumen Perencanaan Daerah kabupaten Seram Bagian Barat, target opini BPK pada tahun 2023 adalah Wajib Tanpa Pengecualian (WTP), namun relisasi yang diberikan oleh BPK RI adalah Wajib Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Beberapa penyebab sehingga target tidak dapat dijangkau adalah :

1. Kurangnya sumber daya aparatur pengawas yang bersertifikasi;
2. Tidak memadainya ketersediaan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan oleh APIP;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dan waktu pelaksanaan program.

Adapun beberapa upaya yang akan di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah :

1. Meningkatkan jumlah sumber daya aparatur yang bersertifikasi;
2. Peningkatan pengembangan system pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan;
3. Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah;
4. Peningkatan kapabilitas aparatur pengawasan internal pemerintah.



## NILAI SAKIP

**N**ilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan target indikator pada Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka pencapaian Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 84,28% dimana realisasi nilai hasil SAKIP Kabupaten Seram Bagian Barat yang disampaikan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebesar 50,57 dari target yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar 60,00. Berdasarkan dengan perbandingan tahun sebelumnya, maka nilai SAKIP mengalami peningkatan pencapaian sebesar 0,37%.

**Grafik 3.11**  
**Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Kabupaten Seram Bagian Barat**



Sumber data : Sekretariat Daerah Kab.SBB

Berdasarkan hasil analisa di atas terdapa beberapa factor yang mempengaruhi, antara lain:

- 1) Kurangnya ketersediaan data kinerja dari masing-masing OPD, adanya kesulitan dalam implementasi data-data tersebut;
- 2) Terdapat beberapa indikator kinerja dirasa kurang sesuai RPD;
- 3) Terdapat beberapa OPD masih belum menggambarkan kinerja secara utuh;

Upaya-upaya pemecahan terhadap permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan system e-planing;
- 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- 3) Meningkatkan Frekwensi monitoring, evaluasi, pendampingan dan pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan.



## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

**I**ndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik selanjutnya.

Berdasarkan target indikator pada Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 84,81% dari target yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar 77,5. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman tentang indeks pelayanan public, Kabupaten

Seram Bagian Barat mendapat nilai 65,73 dan termasuk dalam zona kuning dengan predikat sedang



## INDEKS DESA MEMBANGUN

**I**ndeks Desa Membangun (IDM) adalah prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam **lima status**, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.

Target Indeks Desa Membangun dalam hal ini desa yang termasuk dalam kategori desa mandiri pada tahun 2023 adalah sebanyak 10 desa, namun yang terealisasi sebanyak 9 atau sebesar 90% pencapaian. Berdasarkan hasil capaian kinerja tidak tercapai secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Upaya peningkatan Status dusun menjadi desa/negeri belum tertata secara efektif disebabkan masih disesuaikan dengan adat istiadat local, 2) Masih terdapat persoalan-persoalan internal antara pejabat kepala desa/raja dengan perangkat didalam desa/negeri yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa/negeri tidak terlaksana dengan baik diantaranya terdapat desa/negeri yang tidak transparansi mengelola dana ADD tahun secara menyeluruh. 3) kurangnya pengembangan inovasi desa.

Upaya-upaya pemecahan terhadap permasalahan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah sebagai berikut : 1) Adanya intervensi program dan kegiatan pemberdayaan dalam rangka membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dengan tujuan mengurangi pengangguran dan menekan tingkat kemiskinan. 2) Mendayagunakan sumber-sumber daya alam yang dimiliki masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. 3) Meningkatkan kapasitas tugas dan fungsi aparat pemerintah Negeri/Desa dan kelembagaan Negeri/Desa melalui pelatihan-pelatihan atau pemagangan/ bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan khususnya Implementasi Peraturan Daerah tentang Negeri/Desa dan peraturan turunannya demi terselenggaranya penataan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Desa, pelayanan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan Frekwensi monitoring, evaluasi, pendampingan dan pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan.



## ANGKA KONFLIK SOSIAL

**A**ngka Konflik Sosial mencerminkan tingkat ketegangan dan konflik yang ada dalam masyarakat. Semakin tinggi angka konflik sosial, semakin tinggi tingkat ketegangan dan potensi terjadinya konflik lebih lanjut.

Konflik sosial pada Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan dokumen pembangunan daerah tahun 2023 – 2026 ditargetkan mencapai 2 angka konflik sosial. Namun realisasi pada tahun 2023 hanya terdapat 1 angka konflik sosial. Jika dihitung berdasarkan pencapaian negative, maka pencapaian yang diperoleh sebesar 200%. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang ada di masyarakat dapat ditekan seefisien mungkin, bahkan jika terjadi ketegangan pada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat langsung ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Keberhasilan dalam pencegahan konflik dilakukan dengan upaya : (a). memelihara kondisi damai dalam masyarakat; (b). mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; (c). meredam potensi konflik; dan (d). membangun sistem peringatan dini. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang Harmonis.

#### **A.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.**

Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 didasarkan pada realisasi atas pencapaian target yang tertuang pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 – 2026. Sedangkan pencapaian pada tahun sebelumnya berdasarkan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022. Oleh karena itu, adanya perbedaan sasaran dan tujuan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.5**  
**Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2023**  
**Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Capaian Tahun 2022		No	Capaian Tahun 2023	
	Tujuan	Capaian (%)		Tujuan	Capaian (%)
1.	Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Mapan Serta Pelayanan Publiksesuai Prinsip Good Governance	110,39	1.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	107,49
2.	Terciptanya Toleransi Dengan Suasana Kekeluarga Dalam Kehidupan Agama	4,49	2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	85,85
3.	Melembagakan Nilai - Nilai Budaya Pela Gandong Dan Masohi Dalam Kehidupan Bermasyarakat	122,5	3.	Menurunnya Kemiskinan	105
4.	Menuju Rakyat Seram Bagian Barat Yang Cerdas Dan Berkualitas	79,28	4.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah yang berkelanjutan	92,49
5.	Menuju Rakyat Seram Bagian Barat Yang Sehat Jasmani Dan Rohani	80,48	5.	Meningkatnya Keberadaan Sosial Masyarakat	68,48

No	Capaian Tahun 2022		No	Capaian Tahun 2023	
	Tujuan	Capaian (%)		Tujuan	Capaian (%)
6.	Menuju Kemandirian Rakyat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Berdikari	92,6	6.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Bencana	108,34
7.	Terciptanya Sistem Transportasi Laut, Darat Dan Udara Yang Terintegrasi	90,75	7.	Menurunnya Kesenjangan gender	63,87
8.	Meningkatkan Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian	27,77	8.	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan	67,73
9.	Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Mengandalkan Potensi Ekonomi Daerah	79,21	9.	Mengoptimalkan Kemandirian Desa	90
			10.	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	200

## B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Keseluruhan jabaran APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diimplementasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023. Gambaran anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 yang dikelola oleh Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Seram Bagian Barat per OPD Tahun 2023**

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Inspektorat Daerah	7.935.964.586	7.709.983.840	97,15
2	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	8.565.231.586	7.930.647.827	92,59
3	Dinas Kesehatan	80.644.032.381	76.490.380.518	94,85
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	299.614.067.316	255.640.149.387	85,32
5	Dinas Perikanan	6.048.768.154	5.956.606.254	98,48
6	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.682.015.372	3.639.757.190	98,85
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	114.694.578.835	86.225.587.126	75,18
8	Dinas Kearsipan	1.675.117.344	1.665.781.587	99,44
9	Dinas Pertanian	9.024.343.224	8.923.303.816	98,88

<b>NO</b>	<b>UNIT ORGANISASI</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>(%)</b>
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.503.814.357	1.998.438.770	79,82
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.861.045.716	2.844.711.015	99,43
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.129.090.557	3.793.492.194	91,87
13	Dinas Sosial	13.143.097.313	3.026.518.602	23,03
14	Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.609.543.660	2.559.422.997	98,08
15	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	5.164.110.822	4.906.091.076	95,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja	9.359.521.075	9.367.767.267	100,09
17	Dinas Pariwisata	2.403.597.642	2.505.066.936	104,22
18	Dinas Perhubungan	4.563.385.115	4.502.056.983	98,66
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.082.491.956	3.844.591.358	94,17
20	Dinas Ketahanan Pangan	2.214.176.320	2.034.004.742	91,86
21	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.337.148.491	2.234.045.019	95,59
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.088.611.409	6.963.486.432	98,23
23	Badan Pendapatan Daerah	4.656.559.610	5.170.825.374	111,04
24	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.652.267.138	1.539.484.115	93,17
25	Badan Penanggulangan Daerah	2.569.182.173	2.505.098.776	97,51
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	17.374.449.170	6.053.298.100	34,84

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.303.449.006	4.879.424.445	92,00
28	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	720.540.693.447	718.748.180.983	99,75
29	Badan Perencanaan	4.887.421.087	4.361.044.584	89,23
30	Rumah Sakit Umum Daerah-Piru	11.115.300.389	6.916.372.832	62,22
31	Sekretariat DPRD	34.914.452.330	34.637.295.129	99,21
32	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	374.335.000	345.694.065	92,35
33	Bagian Tata Pemerintahan	468.718.500	460.909.006	98,33
34	Bagian Hukum	1.206.938.300	1.205.850.060	99,91
35	Bagian Administrasi Pembangunan	321.907.600	304.976.431	94,74
36	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	602.933.000	584.699.727	96,98
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9.961.783.000	9.308.283.000	93,44
38	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	555.952.450	519.207.500	93,39
39	Bagian Umum ,Perencanaan Dan Keuangan	5.162.548.230	4.469.183.023	86,57
40	Bagian Organisasi	326.906.500	310.767.972	95,06
41	Kecamatan Seram Barat	1.872.146.796	1.826.581.175	97,57
42	Kecamatan Kairatu	2.631.260.725	2.630.785.127	99,98
43	Kecamatan Taniwel	1.604.555.134	1.552.900.106	96,78

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)
44	Kecamatan Huamual Belakang	1.443.170.353	1.416.449.125	98,15
45	Kecamatan Taniwel Timur	1.387.547.205	1.328.027.890	95,71
46	Kecamatan Kepulauan Manipa	1.055.417.169	988.609.470	93,67
47	Kecamatan Huamual	1.191.767.212	1.141.673.423	95,80
48	Kecamatan Kairatu Barat	1.751.334.078	1.731.791.427	98,88
49	Kecamatan Inamosol	1.353.708.633	1.304.528.491	96,37
50	Kecamatan Amalatu	1.361.870.079	1.303.360.366	95,70
51	Kecamatan Elpaputih	1.223.075.783	1.207.109.029	98,69
52	Sekretariat Daerah	17.179.102.786	15.229.478.267	88,65
	<b>TOTAL</b>	<b>1.450.394.506.114</b>	<b>1.338.743.779.955</b>	<b>92,30</b>

**Tabel 3.5**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Penunjang Kinerja**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
<b>Tujuan : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing</b>			
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Pererongan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	71.774.664.545	
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	2.188.664.000	
3.	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makan Minum	49.680.000	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.992.196.000	
5.	Program Pengelolaan Pendidikan	71.263.361.515	
6.	Program pendidik dan Tenaga Kependidikan	417.358.700	
7.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1.816.832.867	
8.	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	1.729.517.200	
9.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	77.163.500	
10.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	77.020.000	
11.	Program Pengembangan Kebudayaan	217.340.000	
12.	Program Pendaftaran Penduduk	200.288.600	
13.	Program Pencatatan Sipil	226.566.600	
14.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	42.134.800	
<b>Total</b>		<b>152.072.788.327</b>	

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023

<b>Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi</b>			
15.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	16.472.132.154	
16.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.055.030.200	
17.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	614.447.000	
18.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.394.625.000	
19.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.811.367.000	
20.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	211.905.000	
21.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	45.480.000	
22.	Program Penyuluhan Pertanian	178.140.000	
23.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.195.308.000	
24.	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	706.480.850	
25.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	401.241.600	
26.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	2.412.109.907	
27.	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	531.418.000	
28.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	64.680.000	
29.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	68.490.000	
30.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	3.653.630.473	
31.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.244.534.400	
32.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	479.441.000	
33.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	51.520.000	
34.	Program Hubungan Industrial	50.000.000	
35.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.221.002.125	
36.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1.994.669.174	

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023

37.	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	394.476.200	
38.	Program Pemasaran Pariwisata	282.280.000	
39.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	45.000.000	
40.	Program Promosi Penanaman Modal	86.747.500	
41.	Program Pelayanan Penanaman Modal	93.091.000	
42.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	490.400.000	
	<b>Total</b>	<b>48.249.646.583</b>	
<b>Tujuan : Menurunnya Kemiskinan</b>			
43.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	46.317.600	
44.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1.999.414.162	
45.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50.350.000	
46.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	46.850.000	
47.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	16.400.000	
48.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	97.800.000	
49.	Program Pengembangan UMKM	1.325.955.000	
	<b>Total</b>	<b>3.583.086.762</b>	
<b>Tujuan : Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah Yang Berkelanjutan</b>			
50.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	3.547.200.379	
51.	Program Pengembangan Permukiman	3.097.084.649	
52.	Program Kawasan Permukiman	1.148.705.000	
53.	Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan utilitas Umum (PSU)	3.427.275.000	
54.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2.674.727.000	
55.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	24.550.248.555	

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023

56.	Program Penyelenggaraan Jalan	55.631.635.130	
57.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	65.164.000	
58.	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	742.240.000	
59.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.263.880.000	
60.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	569.624.000	
61.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	153.630.000	
62.	Program Pengelolaan Pelayaran	590.320.000	
63.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	5.553.195.360	
64.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	1.727.485.000	
65.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	755.996.100	
66.	Program Penataan Tanah Ulayat	24.894.000	
67.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	3.107.462.393	
68.	Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	421.308.000	
69.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	565.100.000	
70.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	24.976.000	
71.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	52.350.000	
72.	Program Pengelolaan Persampahan	525.590.000	
	<b>Total</b>	<b>110.220.090.566</b>	
<b>Tujuan : Meningkatnya Keberadaan Sosial Masyarakat</b>			
71.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	2.811.175.943	
74.	Program Pemberdayaan Sosial	1.600.648.700	
75.	Program Rehabilitasi Sosial	136.740.000	
76.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	643.444.000	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023**

77.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	34.777.700	
	<b>Total</b>	<b>5.226.786.343</b>	
<b>Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Bencana</b>			
78.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	5.193.279.180	
79.	Program Penanggulangan Bencana	463.845.100	
80.	Program Penanganan Bencana	142.479.000	
	<b>Total</b>	<b>5.799.603.280</b>	
<b>Tujuan : Menurunnya Kesenjangan Gender</b>			
81.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	2.257.402.621	
82.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	164.585.000	
83.	Program Perlindungan Perempuan	419.950.000	
84.	Program Perlindungan Khusus Anak	260.225.000	
85.	Program Pengendalian Penduduk	922.800.000	
86.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.512.699.000	
	<b>Total</b>	<b>7.537.661.621</b>	
<b>Tujuan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>			
87.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	45.901.556.507	
88.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	154.103.134.779	
89.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	414.667.000	
90.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.893.614.600	
91.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	39.848.215.094	
92.	Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	917.437.600	
93.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	532.022.000	

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023

94.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.000.000	
95.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.457.735.000	
96.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7.970.243.800	
97.	Program Kepegawaian Daerah	1.414.793.900	
98.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.114.781.000	
99.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	331.446.500	
100.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	364.326.137.099	
101.	Program Pembinaan Perpustakaan	94.366.100	
102.	Program Pengelolaan Arsip	25.440.000	
103.	Program Perekonomian dan Pembangunan	274.175.500	
104.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75.900.000	
105.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	338.250.100	
106.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	74.260.000	
107.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	83.080.000	
108.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.620.000	
109.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	383.474.000	
110.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	194.715.000	
111.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	61.520.800	
	<b>Total</b>	<b>635.838.586.379</b>	
<b>Tujuan : Optimalisasi Kemandirian Desa</b>			
112.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	3.006.508.238	
113.	Program Penataan Desa	54.827.101	
114.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	88.498.800	
115.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	194.727.048	
116.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	588.449.600	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023**

	<b>Total</b>	<b>3.933.010.787</b>	
<b>Tujuan : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis</b>			
117.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1.698.548.500	
118.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	371.349.100	
119.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.191.801.000	
120.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	228.400.000	
121.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	324.148.000	
122.	Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	55.722.000	
	<b>Total</b>	<b>5.869.968.600</b>	
	<b>Total</b>	<b>978.331.229.248</b>	



# PENUTUP

Uraian secara menyeluruh tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah dipaparkan secara sistematis sebagaimana

dalam bab-bab diatas, untuk itu dalam bab Penutup ini akan disajikan gambaran umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023, kesimpulan terhadap permasalahan umum serta solusi pemecahan masalah yang akan ditempuh. Pelaporan Kinerja 2023, secara umum merupakan gambaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat yang mencakup 10 tujuan dan 15 indikator utama yang ditopang oleh 122 program utama yang dilaksanakan. Namun sesuai dengan tujuan penyusunan yaitu pelaporan terhadap capaian kinerja Kabupaten Seram Bagian Barat, maka mekanisme penyusunan secara lebih spesifik disusun sesuai dengan penjabaran tujuan dan sasaran Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 – 2026.

Laporan ini merupakan upaya perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat atas penggunaan berbagai sumber daya khususnya keuangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang menyebabkan belum tersusunnya dokumen laporan kinerja secara maksimal sesuai dengan tata cara dan mekanisme penyusunan laporan kinerja antara lain :

1. Adanya beberapa jenis pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah yaitu antara lain Laporan Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD, IPPD dan laporan keuangan daerah, dengan mekanisme penyajian yang berbeda-beda, namun dengan tengat waktu penyelesaian laporan yang bersamaan. Kondisi tersebut tentunya menyebabkan tidak terkonsentrasinya penyusunan laporan dengan baik dan terjadinya in-efisiensi pengalokasian sumber daya yang cukup besar hanya untuk sekedar memenuhi penyusunan laporan. Bila dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas, maka kondisi banyaknya jenis laporan yang harus tersusun dengan tengat waktu bersamaan tersebut, tentunya menjadi beban kerja yang tidak efektif bagi seluruh unit pelaksana penyusun pelaporan;
2. Adanya penyesuaian indikator-indikator kinerja utama sebagaimana RPD yang telah ditetapkan, masih belum secara keseluruhan dapat dipahami dan terakselerasi dengan perencanaan OPD. Kondisi ini menyebabkan pada beberapa indikator kinerja sasaran yang dipaparkan belum memiliki data dan informasi pendukung yang mencukupi;
3. Masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tepat, sesuai dan relevan dengan sasaran dan tujuan yang hendak diwujudkan, hal ini menyebabkan penjelasan atas analisis kinerja belum dapat dideskripsikan secara akurat;

4. Perlu dilakukannya Sinergitas melalui penajaman indikator-indikator kinerja mulai indikator kinerja out put, out come, sampai dengan indikator dampak dari setiap dokumen perencanaan, sehingga terjalin kesatuan arah gerak perencanaan antara Visi dan Misi Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Visi dan Misi yang dibangun oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berkenaan dengan kendala-kendala tersebut di atas, saran, usulan, langkah tindak lanjut yang dapat disampaikan dan dilaksanakan yaitu :

1. Perlu adanya penelaahan lebih lanjut dan perumusan kembali atas beberapa indikator kinerja daerah dan indikator kinerja sasaran sehingga dapat memilah indikator kinerja utama (prioritas) dari indikator-indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.
2. Perlu dilaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan secara intensif dan menyeluruh pada segenap aparatur pemerintah, agar setiap individu memahami target kinerja yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
3. Perlu peningkatan kualitas pengendalian, koordinasi, dan sistem informasi kinerja sehingga dapat memantau dan mengintegrasikan informasi kinerja secara menyeluruh dalam satu bentuk kegiatan.

Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan dan pelaporan kinerja ini, kami berharap bahwa Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan khususnya dapat menjadi bahan evaluasi pada proses perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat di masa yang akan datang.

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI CANDRA AS'ADUDDIN, SE, MH**  
Jabatan : Pj. Bupati Seram Bagian Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Piru, 16 Maret 2023

**Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

**ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN, SE, MH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,67
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,44
3.	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	24,95
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,34
4.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Indeks	75,03
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,40
5.	Meningkatnya Keberadaan Sosial Masyarakat	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka	16,39
6.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	172,81
7.	Menurunnya Kesenjangan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,62

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023**

8.	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,67
		Opini BPK		WTP
		Nilai Sakip	Nilai / Predikat	60 (B)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,5
9.	Mengoptimalkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (Jumlah desa yang termasuk kategori desa mandiri)	Jumlah	10
10.	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Angka Konflik Sosial	Angka	2,00

**PROGRAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Pererongan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	71,774,664,545	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	2,188,664,000	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum	49,680,000	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,992,196,000	
5	Program Pengelolaan Pendidikan	71,263,361,515	
6	Program pendidik dan Tenaga Kependidikan	417,358,700	
7	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1,816,832,867	
8	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	1,729,517,200	
9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	77,163,500	
10	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	77,020,000	
11	Program Pengembangan Kebudayaan	217,340,000	

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
12	Program Pendaftaran Penduduk	200,288,600	
13	Program Pencatatan Sipil	226,566,600	
14	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	42,134,800	
15	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	16,472,132,154	
16	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,055,030,200	
17	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	614,447,000	
18	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5,394,625,000	
19	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1,811,367,000	
20	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	211,905,000	
21	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	45,480,000	
22	Program Penyuluhan Pertanian	178,140,000	
23	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4,195,308,000	
24	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	706,480,850	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023**

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
25	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	401,241,600	
26	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	2,412,109,907	
27	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	531,418,000	
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	64,680,000	
29	Program Pengawasan Keamanan Pangan	68,490,000	
30	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	3,653,630,473	
31	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,244,534,400	
32	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	479,441,000	
33	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	51,520,000	
34	Program Hubungan Industrial	50,000,000	
35	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5,221,002,125	
36	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1,994,669,174	
37	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	394,476,200	

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
38	Program Pemasaran Pariwisata	282,280,000	
39	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	45,000,000	
40	Program Promosi Penanaman Modal	86,747,500	
41	Program Pelayanan Penanaman Modal	93,091,000	
42	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	490,400,000	
43	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	46,317,600	
44	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1,999,414,162	
45	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50,350,000	
46	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	46,850,000	
47	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	16,400,000	
48	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	97,800,000	
49	Program Pengembangan UMKM	1,325,955,000	
50	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	3,547,200,379	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023**

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
51	Program Pengembangan Permukiman	3,097,084,649	
52	Program Kawasan Permukiman	1,148,705,000	
53	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU)	3,427,275,000	
54	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2,674,727,000	
55	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	24,550,248,555	
56	Program Penyelenggaraan Jalan	55,631,635,130	
57	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	65,164,000	
58	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	742,240,000	
59	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,263,880,000	
60	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	569,624,000	
61	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	153,630,000	
62	Program Pengelolaan Pelayaran	590,320,000	
63	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	5,553,195,360	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023**

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
64	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	1,727,485,000	
65	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	755,996,100	
66	Program Penataan Tanah Ulayat	24,894,000	
67	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	3,107,462,393	
68	Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	421,308,000	
69	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	565,100,000	
70	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	24,976,000	
71	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	52,350,000	
72	Program Pengelolaan Persampahan	525,590,000	
73	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	2,811,175,943	
74	Program Pemberdayaan Sosial	1,600,648,700	
75	Program Rehabilitasi Sosial	136,740,000	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023**

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
76	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	643,444,000	
77	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	34,777,700	
78	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	5,193,279,180	
79	Program Penanggulangan Bencana	463,845,100	
80	Program Penanganan Bencana	142,479,000	
81	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	2,257,402,621	
82	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	164,585,000	
83	Program Perlindungan Perempuan	419,950,000	
84	Program Perlindungan Khusus Anak	260,225,000	
85	Program Pengendalian Penduduk	922,800,000	
86	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3,512,699,000	
87	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	45,901,556,507	
88	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	154,103,134,779	
89	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	414,667,000	

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
90	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,893,614,600	
91	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	39,848,215,094	
92	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	917,437,600	
93	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	532,022,000	
94	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,000,000	
95	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14,457,735,000	
96	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7,970,243,800	
97	Program Kepegawaian Daerah	1,414,793,900	
98	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,114,781,000	
99	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	331,446,500	
100	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	364,326,137,099	
101	Program Pembinaan Perpustakaan	94,366,100	
102	Program Pengelolaan Arsip	25,440,000	
103	Program Perekonomian dan Pembangunan	274,175,500	

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
104	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,900,000	
105	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	338,250,100	
106	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	74,260,000	
107	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	83,080,000	
108	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,620,000	
109	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	383,474,000	
110	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	194,715,000	
111	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	61,520,800	
112	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	3,006,508,238	
113	Program Penataan Desa	54,827,101	
114	Program Peningkatan Kerjasama Desa	88,498,800	
115	Program Administrasi Pemerintahan Desa	194,727,048	
116	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	588,449,600	
117	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1,698,548,500	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB.SBB 2023**

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
118	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	371,349,100	
119	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3,191,801,000	
120	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	228,400,000	
121	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	324,148,000	
122	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	55,722,000	
<b>Total</b>		<b>978,331,229,248</b>	

Piru, 16 Maret 2023

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



ANDI CHANDRA ASADUDDIN, SE, MH

